

ABSTRAK

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa: “tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal. 2) Bagaimana peran Notaris-PPAT dalam pembuktian data yuridis atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Kendal? dan 3) Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal?

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *sosio legal*. *Sosio legal* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tol Untuk Kepentingan Umum Pada Jalan Tol Di Kabupaten Kendal. Menurut ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyatakan bahwa: “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil (2) Peran Notaris-PPAT atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Kendal Telah Ditetapkan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah harus tetap mengutamakan penyelesaian secara non litigasi. Sesuai dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3) Kendala dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Jalan Tol di Kabupaten Kendal, diantaranya Ada beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang, solusinya peran aktif dari panitia pengadaan tanah.

Saran : Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah perlu memperhatikan bentuk Pemberian Ganti Kerugian berdasarkan nilai Ganti Kerugian. Agar tidak menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Jalan Tol

ABSTRACT

The issue of land acquisition is very vulnerable in its handling, because in it concerns the livelihoods of many people, when viewed from the government's need for land for development purposes, it can be understood that: "available state land is very limited, therefore the only way that can be taken is to free land owned by the community, both those that have been controlled with rights based on Customary Law and other rights according to the LoGA

The formulation of the problem in this study is (1) How is the implementation of land acquisition for public interest on toll roads in Kendal Regency. 2) (2) What is the role of the Notary-PPAT in verifying juridical data on compensation for land acquisition for the public interest of toll roads in Kendal Regency? and 3) What are the obstacles and solutions to the implementation of land acquisition for public interest in toll roads in Kendal Regency?

Based on the problem formulation and research objectives, the method used is the socio-legal approach. Socio-legal is an approach that is carried out by seeing a legal reality in the community, and serves as a support to identify and clarify findings of non-legal materials for the purposes of legal research or writing.

From the results of this study, it is known that (1) Implementation of Toll Road Procurement in the Public Interest in Toll Roads in Kendal Regency. According to the provisions of Article 13 of Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement states that: "land acquisition for public interest is carried out through stages: planning, preparation, implementation, delivery of results (2) Role of Notary-PPAT for compensation for land acquisition for the public interest of toll roads in Kendal Regency. If things happen that are not desirable the government must still prioritize settlement in non-litigation. In accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. 3) Constraints and Solutions for the Implementation of Land Procurement in the Public Interest in Toll Roads in Kendal Regency, among them There are some residents who sell and buy land (land for sale) carried out freely by landowners, without reporting to the authorities, the solution active from the land acquisition committee.

Suggestion: In the process of procuring land for development for public interest the government needs to pay attention to the form of Giving compensation based on the value of compensation. In order not to cause problems between the government and the community. So that it can create a just, prosperous and prosperous society and the implementation of development in the public interest.

Keywords: Land Procurement, Compensation, Toll Road